

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Landasan Teori

1. Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*)

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing (Ramadhan, 2025). Menurut Bird (1981) dalam Gedeona (2009), desentralisasi fiskal mencakup empat unsur utama, yaitu kewenangan pengeluaran, kewenangan penerimaan, mekanisme transfer antartingkat pemerintahan, serta pinjaman daerah. Melalui penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Penyelenggaraan desentralisasi fiskal diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kebijakan tersebut mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan pendapatan daerah, transfer ke daerah, serta pembiayaan yang menjadi bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal berkaitan erat dengan

penyaluran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan (Abae, 2025).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Ramadhan, 2025). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Alhusain, 2018). Pengaturan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sering digunakan untuk menilai kapasitas fiskal suatu daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Daerah yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang lebih besar cenderung memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah

terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Menurut Anynda *et al.*, (2020) semakin besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah, semakin menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal (Abae, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui transfer tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan kepada daerah guna membantu pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) mempertimbangkan kondisi keuangan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Menurut

Anggraeni *et al.*, (2023), daerah yang memiliki tingkat kemampuan keuangan relatif rendah cenderung memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki kapasitas keuangan yang lebih tinggi. Perbedaan alokasi tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan fiskal yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Selain digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) juga berkaitan dengan pelaksanaan berbagai program pelayanan publik dan pembangunan daerah. Marliana *et al.*, (2022) menyatakan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan secara efektif dan efisien dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik karena pemerintah daerah memiliki dukungan pendanaan yang lebih memadai dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kegiatan yang menjadi urusan daerah serta sejalan dengan prioritas nasional (Puspita, 2026). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendukung pendanaan kebutuhan

husus yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan pada kegiatan tertentu yang memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui sumber pendapatan daerah maupun dana transfer yang bersifat umum. Kebutuhan khusus tersebut merujuk pada kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan melalui mekanisme distribusi dana secara umum serta berkaitan dengan komitmen dan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebutuhan tersebut dapat berupa pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, sanitasi, maupun sektor lain yang menjadi prioritas pembangunan nasional (Qosim, 2025).

5. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran (Sudaryo, 2021). Alokasi belanja modal umumnya diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Andriana (2020), belanja modal memiliki keterkaitan dengan aktivitas perekonomian karena pengeluaran yang dilakukan pemerintah, terutama pada pembangunan infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan berbagai fasilitas publik melalui belanja modal juga berkaitan dengan peningkatan

aktivitas ekonomi masyarakat yang berpotensi memperluas sumber penerimaan daerah, termasuk yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Belanja modal terdiri atas beberapa kelompok pengeluaran, yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa belanja modal tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup berbagai pengeluaran yang menghasilkan aset yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Halim, 2008).

6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri (Nailufar, 2026). Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pinjaman. Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari luar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan (Darmawati, 2025).

Tingkat kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dihimpun. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan sumber pendanaan dari luar daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah yang dimiliki. Menurut Thoha *et al.*, (2024), tingkat kemandirian keuangan yang tinggi menunjukkan kapasitas keuangan daerah yang lebih kuat dalam mendukung kebutuhan pembiayaan daerah. Informasi mengenai tingkat kemandirian tersebut juga dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak dalam menilai kemampuan keuangan daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, Tahun	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal, <i>Economic Growth</i> sebagai Variabel Pemoderasi Provinsi Jawa Timur Penulis: Afifah Tamara Budiriananti, Anny Widiasmara, M. Agus Sudrajat Tahun: 2021	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2: Dana Alokasi Umum (DAU) X3: Dana Alokasi Khusus (DAK) Variabel Dependen: Y: Belanja Modal Variabel Moderasi: Z: <i>Economic Growth</i>	<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, <i>Economic Growth</i> tidak mampu memoderasi pengaruh PAD, DAU, maupun DAK terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur periode 2013–2018.

2.	Judul: Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Penulis: Nur Shafira Anynda, Suwardi Bambang Hermanto Tahun: 2020	Variabel Independen: X1: Rasio Kemandirian Daerah X2: Efektifitas Pendapatan Asli Daerah X3: Pengelolaan Belanja Daerah Variabel Dependen: Y: Kinerja Keuangan Daerah	Regresi Linear Berganda	Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.	Judul: Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah Penulis: Nina Andriana Tahun: 2020	Variabel Independen: X1: Dana Perimbangan X2: Belanja Modal Variabel Dependen: Y: Kemandirian Daerah	Regresi Linear Berganda	Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.
4.	Judul: Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Penulis: Siska Yulia Defitri Tahun: 2020	Variabel Independen: X1: Belanja Modal X2: Belanja Pegawai Variabel Dependen: Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Regresi Linear Berganda	Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
5.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Alokasi Umum	Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU)

	Tahun 2016-2018	X3: Dana Alokasi Khusus		berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016–2018.
	Penulis: Siti Dini, Yusni Yanti Linsa Siallagan, Evi Fitanta br Tarigan, Rosalia Priskila Sihombing, Angelica Kinanti Oktavia Simatupang	Variabel Dependen: Y: Belanja Modal		
	Tahun: 2020			
6.	Judul: Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: X1: Dana Alokasi Umum X2: Dana Alokasi Khusus X3: Dana Bagi Hasil X4: Dana Keistimewaan	Regresi Linear Berganda	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Keistimewaan berpengaruh signifikan positif, serta Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh. Namun, secara simultan DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2013–2019.
	Penulis: Anikmah Musfirati, Hari Sugiyanto	Variabel Dependen: Y: Tingkat Kemandirian Daerah		
	Tahun: 2021			
7.	Judul: Pengaruh PAD, <i>Tax Effort</i> , Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: X1: PAD X2: <i>Tax Effort</i> X3: Belanja Modal	Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan <i>Tax Effort</i> tidak berpengaruh dan Belanja Modal berpengaruh negatif pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2017–2019.
	Penulis: Cindi Oktavia, Nur Handayani	Variabel Dependen: Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah		
	Tahun: 2021			

8.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019) Penulis: Firda Monica, Chairul Sa'roni Tahun: 2022	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Bagi Hasil X3: Dana Alokasi Umum X4: Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Intervening: Belanja Daerah	<i>Path Analysis</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu, PAD dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta Belanja Daerah mampu memediasi pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010–2019.
9.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2020 Penulis: Rini Marlina, Agung Slamet Prasetyo, Prafidhya Dwi Yulianto Tahun: 2022	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2: Dana Alokasi Umum (DAU) X3: Dana Alokasi Khusus (DAK) X4: Dana Bagi Hasil (DBH) X5: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Variabel Dependen: Y: Belanja Modal	Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH, dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2013–2020.
10.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Alokasi Umum X3: Belanja Modal	Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi

Penulis: Shinta Bella, Fitrah Sari, Ullya Rahmi Aswin Tahun: 2022	Variabel Dependen: Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Umum (DAU) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Namun, secara simultan PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten dan kota se- Provinsi Sumatera Barat.
11. Judul: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2018-2020) Penulis: Erina Setiana Putri, Nur Ika Mauliyah Tahun: 2022	Variabel Independen: X1: Pertumbuhan Ekonomi X2: Pendapatan Asli Daerah X3: Dana Alokasi Umum X4: Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Y: Belanja Modal	Regresi Linear Berganda Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Namun, secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.
12. Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Penulis: Addin Nurma Rahmitasari, Nur Fadrijh Asyik Tahun: 2023	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Alokasi Umum X3: Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Y: Belanja Modal Variabel Moderasi: Z: Pertumbuhan Ekonomi	<i>Regression</i> <i>Analysis (MRA)</i> Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU dan DAK terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

13.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Alokasi Umum X3: Dana Bagi Hasil	Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
	Penulis: Risma Dwi Anggraeni, Sapari	Variabel Dependen: Y: Belanja Modal		
	Tahun: 2023			
14.	Judul: Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Barat	Variabel Independen: X1: Rasio Derajat Desentralisasi X2: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah X3: Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA	Regresi Linear Berganda	Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Selain itu, ketiga variabel tersebut secara simultan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
	Penulis: Sri Mulyani, Halkadri Fitra	Variabel Dependen: Y: Alokasi Belanja Modal		
	Tahun: 2023			
15.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2: Dana Alokasi Umum (DAU) X3: Dana Alokasi Khusus (DAK) X4: Dana Bagi Hasil (DBH)	Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017–2020.
	Penulis: Abellisa Aulia Devi, Achmad Tjahjono	Variabel Dependen: Y: Belanja Modal		
	Tahun: 2023			
16.	Judul: Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah,	Variabel Independen: X1: Rasio Efektivitas	Regresi Linear Berganda	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rasio Efisiensi PAD tidak

	Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022	Pendapatan Asli Daerah X2: Rasio Efisiensi X3: Rasio Desentralisasi Fiskal X4: Rasio Kemandirian Daerah		berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2018–2022.
	Penulis: Muhammad Nuur Farid Thoha, Firsty Annisa Novianti	Variabel Dependen: Y: Belanja Modal		
	Tahun: 2024			
17.	Judul: Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: X1: Ukuran Pemerintah X2: Pertumbuhan Ekonomi X3: Belanja Modal	Regresi Linear Berganda	Ukuran Pemerintahan dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
	Penulis: Aditia Warman, Fefri Indra Arza	Variabel Dependen: Y: Kemandirian Daerah		
	Tahun: 2024			
18.	Judul: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	Variabel Independen: X1: Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah X3: Dana Alokasi Umum X4: Dana Alokasi Khusus	Regresi Linear Berganda	Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Namun, secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu periode 2014–2018.
	Penulis: Muhammad Farhan Muchtar, Dirvi Surya Abbas, Sigit Budi Santoso	Variabel Dependen: Y: Alokasi Belanja Modal		
	Tahun: 2024			
19.	Judul: Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli	Variabel Independen:	Regresi Linear Berganda	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal,

	Daerah terhadap Belanja Modal	X1: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		sedangkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun, secara simultan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten Karawang periode 2018–2023.
	Penulis: Siti Nuraeni, Nunung Nurhasanah, Kosasih	X2: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah		
	Tahun: 2024	Variabel Dependen: Y: Belanja Modal		
20.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Belanja Modal	Regresi linear berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2018–2022.
	Penulis: Riris Nurjanah, Arvian Triantoro, Raden Dian Hardiana	Variabel Dependen: Y: Kemandirian Keuangan		
	Tahun: 2024	Variabel Moderasi: Z: Pertumbuhan Ekonomi		
21.	Judul: Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen: X1: Belanja Modal X2: Belanja Pegawai	Regresi Linear Berganda	Belanja Pegawai dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.
	Penulis: Amanda Zhafiera Maharani, Angelin Sherlina Annundi, Fina Widia Wulansari, Indah Aprilia Susanti, Oryza Ardhiarisca	Variabel Dependen: Y: Pendapatan Asli Daerah		
	Tahun: 2024			

22.	Judul: Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Penulis Yulia r Tahun: 2024	Variabel Independen: X1: Dana Alokasi Umum (DAU) X2: Dana Alokasi Khusus (DAK) X3: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X4: Dana Bagi Hasil (DBH) Variabel Dependen: Y: Belanja Modal	Regresi Linear Berganda	Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh. Namun, secara simultan DAU, DAK, PAD, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
23.	Judul: Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Penulis: Nanda Saputra Pratama, Umiaty Hamzani, Muhsin, Rusliyawati, Angga Permadi Karpriana Tahun: 2025	Variabel Independen: X1: Dana Alokasi Umum X2: Dana Alokasi Khusus X3: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Y: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Intervening: Z: Belanja Modal	Path Analysis	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, tetapi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan IPM, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap keduanya. Selain itu, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM serta tidak mampu memediasi pengaruh DAU dan DAK terhadap IPM, tetapi mampu memediasi pengaruh PAD terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat periode 2019–2023.

24.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur) Penulis: Imel Oktaviani Pramesti, Titik Mildawati Tahun: 2025	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Bagi Hasil X3: Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
25.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai Pemoderasi Penulis: Raden Doli Tejabaskara, Sigit Budi Santoso, Imam Hidayat Tahun: 2026	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Alokasi Umum X3: Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Y: Belanja Modal Variabel Moderasi: Z: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak mampu memoderasi hubungan antara PAD, DAU, maupun DAK terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Banten periode 2020–2024.
26.	<i>Title:</i> <i>The Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, and Fund for The Results of The District Capital Expenditure Allocation and North Sumatra Province City, 2010-2019</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Regional Original Income</i> X2: <i>General Allocation Funds</i> X3: <i>Specific Allocation Funds</i> X4: <i>Fund for The Results</i> <i>Dependent Variable:</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

<i>Authors:</i> Ira Safitri, Beby Kendida Hasibuan, Amlys Syahputra Silalahi, Syahyunan				Y: <i>Capital Expenditure Allocation</i>	Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2010–2019.
<i>Year:</i> 2021					
27.	<i>Title:</i> <i>The Role of Moderating Economic Growth Variables on the Effect of Allocation Funds and Capital Expenditures in Local Government</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> X2: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i>	<i>Path Analysis</i>		Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak mampu memediasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal, tetapi mampu memediasi pengaruh DAK terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2016–2019.
<i>Authors:</i> Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah Puji Astuti				<i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>	
<i>Year:</i> 2021				<i>Mediating Variable:</i> Z: <i>Economic Growth (PE)</i>	
28.	<i>Title:</i> <i>The Effect of Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds and Rest of Budget Calculations on Capital Expenditures in District and City Governments in West Sumatra Province</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i> X2: <i>Revenue Sharing Fund (DBH)</i> X3: <i>Remaining Budget Calculation (SiLPA)</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>		Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan DAK, DBH, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
<i>Authors:</i> Febryandhie Ananda, Dewi Hariani				<i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Fiscal Performance</i>	
<i>Year:</i> 2022					
29.	<i>Title:</i> <i>Local Government Own-source Revenue and General Allocation Funds on Capital Expenditure: Economic</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Local Government Own-</i>	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>		Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi

	<i>Growth as Moderating Variable</i>	<i>Source Revenue (PAD)</i> X2: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Economic Growth</i> <i>Moderating Variable:</i> Z: <i>Capital Expenditure</i>		Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi dengan memperkuat hubungan antara PAD maupun DAU terhadap Belanja Modal.
	<i>Authors:</i> Mulyana Mulyana, Muhammad Din, Mustamin Mustamin, Andi Mattulada Amir, Fikry Karim, Betty Betty			
	<i>Year:</i> 2022			
30.	<i>Title:</i> <i>The Influence of Original Local Government Revenue, Specific Allocation Fund on Government Capital Expenditures in Southeast Sulawesi District/City</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Original Local Government Revenue</i> X2: <i>Specific Allocation Fund</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditures</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, secara simultan PAD dan DAK juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
	<i>Authors:</i> Erwin Hadisantoso, Arifuddin, Andi Basru Wawo, Muh. Ridwan			
	<i>Year:</i> 2023			
31.	<i>Title:</i> <i>The Influence of Original Revenue and Transfer Revenue on Capital Expenditure in South Tangerang City</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Original Revenue</i> X2: <i>Transfer Revenue</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Tangerang Selatan periode 2012–2021.
	<i>Authors:</i> Ahmad Mu'am, Nurliah Nurdin, Agus Sudrajat, R. Luki Karunia			
	<i>Year:</i> 2023			
32.	<i>Title:</i> <i>The Effect of Regional Original Revenue and General Allocation Fund on</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Regional Original Revenue</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal,

<i>Capital Expenditure in West Java Province for the 2017-2020 Period</i> <i>Authors:</i> Saska Salsadilla Kurniawan, Sendi Gusnandar Arnan <i>Year:</i> 2023		X2: <i>General Allocation Fund</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>	sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat periode 2017–2020.
33.	<i>Title:</i> <i>Factors Affecting Capital Expenditure in Districts in West Java Province</i> <i>Authors:</i> Kholida Atiyatul Maula, Kartika Nur Alfiyyah, Isro'iyatul Mubarakah, Wiwiek Rabiatul Adawiyah, Christina Tri Setyorini <i>Year:</i> 2023	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Original Local Own Revenue (PAD)</i> X2: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> X3: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i> X4: <i>Revenue Sharing Funds (DBH)</i> X5: <i>Excess Budget Financing (SiLPA)</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i> Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
34.	<i>Title:</i> <i>Analysis of Factors Affecting Capital Expenditure in The Province of Yogyakarta in 2013-2022</i> <i>Authors:</i> Suhesti Ningsih, Hafizah Wa Akromah, Muh. Hasan Ma'ruf <i>Year:</i> 2023	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Local Taxes</i> X2: <i>Regional Levies</i> X3: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> X4: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i> Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013–2022.

35.	<i>Title:</i> <i>Economic Growth Rate, locally-Generated Revenue, general Purpose Transfers, Regional Capital Investment, And All Have an Impact on The Degree of Regional Fiscal Independence (Case Study in Regencies/Cities in Central Java Province 2017–2021 Period)</i> <i>Authors:</i> Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M., Ak, Ibnu Muttaqin, S.Pd., M.Si, Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt, Yudis Prastyono <i>Year:</i> 2023	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Economic Growth Rate</i> X2: <i>Locally-Generated Revenue (LGR/PAD)</i> X3: <i>General Purpose Transfers</i> X4: <i>Regional Investment</i> X5: <i>Capital Expenditure</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Degree of Regional Fiscal Independence</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah, sedangkan <i>Economic Growth Rate</i>, Dana Transfer Umum, dan Investasi Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2017–2021.
36.	<i>Title:</i> <i>Effect of Regional Original Income and Balanced Funds on Capital Expenditures with Economic Growth as Moderating</i> <i>Authors:</i> Dihan Tari Woro Puspita, Lenda Komala <i>Year:</i> 2023	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Regional Original Income (PAD)</i> X2: <i>Balanced Funds</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i> <i>Moderating Variable:</i> Z: <i>Economic Growth</i>	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh PAD maupun Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi DKI Jakarta periode 2017–2021.
37.	<i>Title:</i> <i>Determinants of Capital Expenditure in the Government of North Sumatra for the Years 2020–2022</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Local Original Revenue (PAD)</i> X2: <i>General Allocation Fund (DAU)</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak

	<i>Authors:</i> Benhard Sebastian Purba, Stefanus Efrata Manullang, Jenny Zain, Oky Syahputra	X3: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i> X4: <i>Revenue Sharing Fund (DBH)</i>		berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2022.
	<i>Year:</i> 2024	<i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>		
38.	<i>Title:</i> <i>Intergovernmental Transfer and Local Own-Source Revenue on Capital Expenditure</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i> X2: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> X3: <i>Revenue Sharing Fund (DBH)</i> X4: <i>Local Own-Source Revenue (PAD)</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2018–2021.
	<i>Authors:</i> Susilo, Risqi Noor Hidayati Putri, Finka Yolanda Simangunsong, Mutiara Labiba			
	<i>Year:</i> 2024	<i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>		
39.	<i>Title:</i> <i>The effect of Local Original Revenue (PAD), Special Allocation Fund (DAK) and General Allocation Fund (DAU) on Capital Expenditure in Bengkulu Province</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Local Original Revenue (PAD)</i> X2: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i> X3: <i>General Allocation Fund (DAU)</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Bengkulu.
	<i>Authors:</i> Citra Mayasari, Fadli			
	<i>Year:</i> 2024	<i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>		
40.	<i>Title:</i> <i>Analysis of the Influence of Local Original Income,</i>	<i>Independent Variable:</i>	<i>Path Analysis</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

<i>General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Economic Growth with Capital Expenditure as an Intervening Variable in Regional Governments throughout Manggarai Raya in 2013-2023</i>			X1: <i>Local Original Income (PAD)</i> X2: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> X3: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i>	berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, PAD, DAK, dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Modal mampu memediasi pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Manggarai Raya periode 2013–2023.
<i>Authors:</i> Valentin Romualda Gaudiosa Bella Adur			<i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Economic Growth</i>	
<i>Year:</i> 2024			<i>Intervening Variable:</i> Z: <i>Capital Expenditure</i>	
41.	<i>Title:</i> <i>Factors Affecting Capital Expenditure in Provincial Governments in Indonesia</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Local Revenue (PAD)</i> X2: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> X3: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i> X4: <i>Excess Budget Financing (SiLPA)</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif. Namun, secara simultan PAD, DAU, DAK, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Indonesia periode 2020–2022.
<i>Authors:</i> Dwi Asih Setya Ningrum, Fitriasuri, Dina Mellita, Dewi Sartika			<i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>	
<i>Year:</i> 2024				
42.	<i>Title:</i> <i>Evaluating the Effectiveness of Special and General Allocation Funds on Capital Spending in Indonesia Regional Economies</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan.

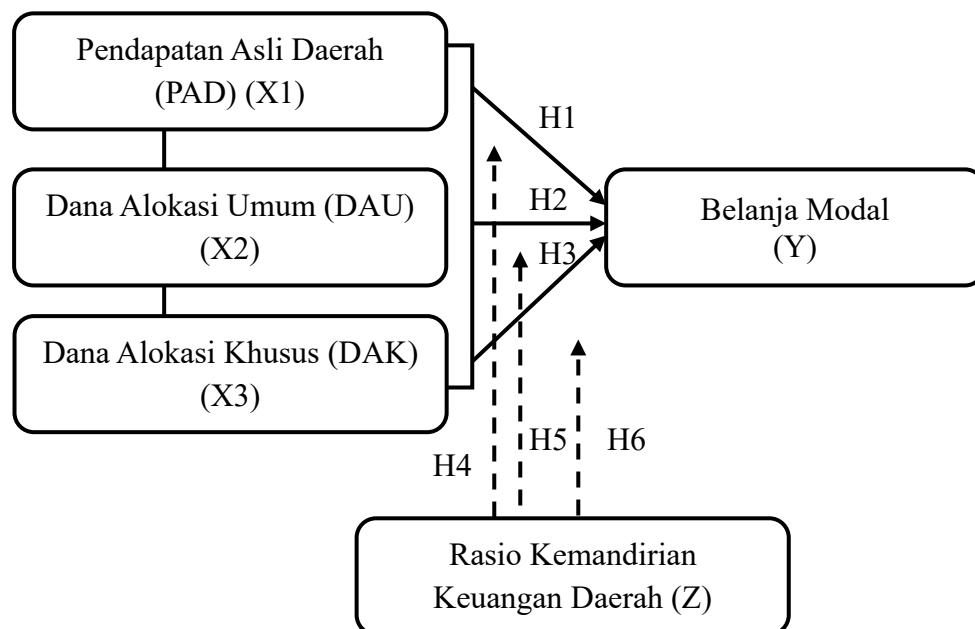
	<i>Authors:</i> Meme Rukmini, Duwi Riningsih, Shindy Dwita Nuansari, Ferdy Yunanto, Mayciella So <i>Year:</i> 2025	X2: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Spending</i>	Namun, secara simultan DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Indonesia periode 2021.
43.	<i>Title:</i> <i>Analysis of the Impact of Transfer Funds and Local Revenue on Government Capital Expenditure in Regencies/Cities in West Java: Testing the Existence of the Flypaper Effect</i> <i>Authors:</i> Maulani Dwi Asmarawati, Ismail Marzuki Randos <i>Year:</i> 2025	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Transfer Funds</i> X2: <i>Local Revenue</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Government Capital Expenditure</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i> Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
44.	<i>Title:</i> <i>Regional Fiscal Dynamics: The Influence of Local Revenue and Transfer Receipts on Capital Expenditure</i> <i>Authors:</i> Rineliana, Edi Susanto, Agung Gunawan, Omar Farrakhan Tampubolon, Dahlan Tampubolon <i>Year:</i> 2025	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Regional Original Revenue (PAD)</i> X2: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> X3: <i>Revenue Sharing Fund (DBH)</i> X4: <i>Non-Physical Special Allocation Fund (Non-Physical DAK)</i> <i>Dependent Variable:</i> Y: <i>Capital Expenditure</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i> Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.
45.	<i>Title:</i> <i>The Effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Regional Original Revenue (PAD)</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i> Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan

<i>Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure in the Morowali Regency Government During 2016–2024</i>	X2: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> X3: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i>	signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, secara simultan PAD, DAU, dan DAK juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Morowali periode 2016–2024.
<i>Authors:</i> Ahmad, Zainal Abidin, Basri Rakhman	<i>Dependent Variable:</i>	
<i>Year:</i> 2025	Y: <i>Capital Expenditure</i>	
46. <i>Title:</i> <i>The Influence of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund on Capital Expenditure in Districts in South Sulawesi Province</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>Regional Original Revenue</i> X2: <i>General Allocation Fund</i> X3: <i>Special Allocation Fund</i>	<i>Multiple Linear Regression Analysis</i>
<i>Authors:</i> Anthon Misalayuk, Jannati Tanggisalu, Ampauleng	<i>Dependent Variable:</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Namun, secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
<i>Year:</i> 2025	Y: <i>Capital Expenditure</i>	
47. <i>Title:</i> <i>Fiscal Transfers and Local Revenue: Examining the Mediating Role of Capital Expenditure in Indonesia</i>	<i>Independent Variable:</i> X1: <i>General Allocation Fund (DAU)</i> X2: <i>Special Allocation Fund (DAK)</i>	<i>Path Analysis</i>
<i>Authors:</i> Ilham Djuhri Winanda, Kamaliah, Ulfa Afifah	<i>Dependent Variable:</i>	Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Selain itu, DAK dan DAU tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja Modal mampu memediasi pengaruh DAK terhadap PAD, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh DAU terhadap PAD di
<i>Year:</i> 2026	Y: <i>Local Revenue (PAD)</i>	
	<i>Mediating Variable:</i> Z: <i>Capital Expenditure</i>	

			Provinsi Riau periode 2020–2024.
48. Title:	Independent Variable:	Multiple Linear Regression Analysis	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat.
<i>The Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditures</i>	X1: Regional Original Income		
	X2: General Allocation Funds		
	X3: Special Allocation Funds		
Authors:	Dependent Variable:		
Patria Nagara, Divia Amanda Eka Putri, Novi Yanti, Novi Hendri	Y: Capital Expenditures		
Year:			
2026			
49. Title:	Independent Variable:	Multiple Linear Regression Analysis	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Selain itu, secara simultan PAD, DAK, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2019–2023.
<i>Determinants of Capital Expenditure Allocation in Central Sulawesi Province 2019 – 2023</i>	X1: Regional Original Revenue (PAD)		
	X2: Special Allocation Fund (DAK)		
	X3: Economic Growth		
Authors:	Dependent Variable:		
Rahmat Lasimpala, Edhi Taqwa, Yunus Sading, Suparman, Rita Yunus	Y: Capital Expenditure		
Year:			
2026			
50. Title:	Independent Variable:	Multiple Linear Regression Analysis	PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen.
<i>Analysis of the Influence of PAD and DAU on Capital Expenditure in The Bireuen Regency Government</i>	X1: Original Local Own Revenue (PAD)		
	X2: General Allocation Fund (DAU)		
Authors:	Dependent Variable:		
Safwatul Muna, Qamara Nuzula, M. Reza, Siti Sahar Maulidia, Zurrahmah	Y: Capital Expenditure		
Year:			
2026			

Sumber: Data Diolah (2026)

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Modifikasi Budiriananti *et al.*, (2021) & Rahayu *et al.*, (2025)

Keterangan:

————→ : Pengaruh langsung PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal

-----→ : Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam memoderasi hubungan PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal.

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai hubungan antarvariabel yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian (Tohardi, 2019). Kerangka ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi yang akan diuji dalam penelitian. Selain itu, kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan hipotesis serta analisis terhadap hubungan antarvariabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditempatkan sebagai variabel

independen. Ketiga variabel tersebut diperkirakan memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sebagai variabel dependen. Sementara itu, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan sebagai variabel moderasi yang diperkirakan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Hubungan antarvariabel tersebut menjadi dasar dalam menganalisis pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah terhadap Belanja Modal dengan mempertimbangkan tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019–2025.

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Menurut Rahmitasari *et al.*, (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan tersebut menjadi sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal sebagai implementasi asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam memengaruhi Belanja Modal pemerintah daerah. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam

menggali sumber pendapatan secara mandiri untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Kedua, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana publik melalui Belanja Modal. Ketiga, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga mampu meningkatkan realisasi Belanja Modal.

Penelitian terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Hadisantoso *et al.*, 2023). Penelitian terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dilakukan pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Mu'am *et al.*, 2023). Penelitian juga dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Kurniawan *et al.*, 2023). Penelitian terkait juga dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Purba *et al.*, 2024). Penelitian lain terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau

dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Susanto *et al.*, 2025). Sehingga hipotesis dalam penelitian yaitu:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Menurut Putri *et al.*, (2022), berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (71), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal dan kualitas pelayanan publik di setiap daerah. Dengan adanya alokasi tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan publik.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran penting dalam memengaruhi Belanja Modal pemerintah daerah. Pertama, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana serta prasarana publik. Kedua, besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam mengalokasikan anggaran Belanja

Modal. Ketiga, adanya Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan dukungan pendanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat mendorong peningkatan Belanja Modal.

Penelitian terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Ningsih *et al.*, 2023). Penelitian terkait Dana Alokasi Umum (DAU) juga dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Mayasari *et al.*, 2024). Penelitian juga dilakukan pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Ningrum *et al.*, 2024). Penelitian terkait juga dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Susanto *et al.*, 2025). Penelitian lain terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Pratama *et al.*, 2025). Sehingga hipotesis dalam penelitian yaitu:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Menurut Muchtar *et al.*, (2024), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung pendanaan kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Alokasi dana tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pendanaan pada sektor-sektor strategis yang memerlukan investasi, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran penting dalam memengaruhi Belanja Modal pemerintah daerah. Pertama, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendanaan yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan khusus, terutama pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional. Kedua, semakin besar alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pemerintah daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pengadaan aset tetap dan pembangunan infrastruktur melalui Belanja Modal. Ketiga, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang difokuskan pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mendorong peningkatan alokasi Belanja Modal.

Penelitian terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan hasil penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Safitri *et al.*, 2021). Penelitian terkait Dana Alokasi Khusus juga dilakukan pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Devi *et al.*, 2023). Penelitian juga dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan hasil penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Susilo *et al.*, 2024). Penelitian terkait juga dilakukan pada wilayah Manggarai Raya dengan hasil penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Adur, 2024). Penelitian lain terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Lasimpala *et al.*, 2026). Sehingga hipotesis dalam penelitian yaitu:

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Menurut Bella *et al.*, (2022), Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pendapatan daerah, terutama pajak dan retribusi daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan mampu mendorong setiap pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian keuangan sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diduga memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Pertama, tingginya rasio kemandirian keuangan mencerminkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang besar terhadap total pendapatan daerah. Kedua, daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan prioritas penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai kebutuhan pembangunan daerah karena tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketiga, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembiayaan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Belanja Modal sebagai bentuk

investasi jangka panjang dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.

Penelitian terkait Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel moderasi dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (Rahayu *et al.*, 2025). Sehingga hipotesis dalam penelitian yaitu:

H4: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Menurut Oktavia *et al.*, (2021), Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pemanfaatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Kemandirian tersebut tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tingkat kemandirian keuangan menggambarkan kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diduga memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Pertama, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bertujuan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah sehingga menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya. Kedua, daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi memiliki ketergantungan yang lebih rendah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga pemerintah daerah dapat lebih selektif dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai prioritas pembangunan. Ketiga, berkurangnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) memungkinkan pemerintah daerah mengarahkan pemanfaatan dana tersebut secara lebih optimal untuk mendukung Belanja Modal dibandingkan hanya memenuhi kebutuhan belanja rutin. Sehingga hipotesis dalam penelitian yaitu:

H5: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Menurut Warman *et al.*, (2024), Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah

juga menunjukkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan dari luar. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diduga memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Pertama, Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional sehingga penggunaannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kedua, pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik dalam mendukung pelaksanaan program yang didanai oleh DAK, seperti penyediaan anggaran pendukung, pemeliharaan aset, maupun keberlanjutan program setelah pembangunan selesai. Ketiga, kemampuan tersebut memungkinkan pemanfaatan DAK menjadi lebih optimal sehingga pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK dapat meningkatkan realisasi Belanja Modal secara lebih efektif.

H6: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.